

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang Analisis Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2015-2017 dengan menggunakan analisis rasio keuangan derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio keuangan derajat kontribusi BUMD. Dari hasil analisis yang telah diuraikan di atas maka dapat dibuat kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan Derajat Desentralisasi dapat diketahui bahwa derajat desentralisasi tahun anggaran 2015-2017 cenderung fluktuatif, yakni pada tahun anggaran 2015 sebesar 4,20%, pada tahun 2016 meningkat sebesar 4,40%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yakni sebesar 3,42%. Secara umum nilai rata-rata Rasio Keuangan Derajat Desentralisasi dari periode tahun anggaran 2015-2017 adalah sebesar 4,006%. Hal ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah masih sangat rendah.
2. Berdasarkan hasil analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2015-2017 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebesar 94,45%, pada tahun 2016 meningkat menjadi 95,59%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 91,57%. Secara umum nilai rata-rata dari periode tahun anggaran 2015-2017 adalah sebesar 93,87%. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketergantungan

keuangan daerah yang sangat tinggi karena berada dalam skala 75-100% dengan pola hubungan yang bersifat instruktif.

3. Berdasarkan hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2015 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Malaka sebesar 4,44%, pada tahun 2016 meningkat yakni menjadi 4,60%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yakni sebesar 3,73%. Secara umum nilai rata-rata rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada periode tahun anggaran 2015-2017 adalah sebesar 4,25%, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka memiliki tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah dengan pola hubungan yang bersifat instruktif.
4. Rasio Derajat Kontribusi BUMD pada periode tahun anggaran 2017 adalah sebesar 0,85%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Penerimaan Bagian Laba BUMD terhadap total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sangatlah minim.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupten Malaka diharapkan mampu mengoptimalkan lagi pengelolaan PAD dan menggali potensi-potensi daerahnya yang potensial bagi pemasukan PAD, sehingga semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi dan lebih mandiri dalam membiayai pemerintahannya dan tidak tergantung pada sumber penerimaan keuangan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi.
2. Perusahaan Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah, sehingga laba dari BUMD memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Dwirandra, A.A.N.B, 2007, “*Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2002–2006*”, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.

Ermhita Savitry, 2012, “*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makasar*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 1

Halim, Abdul, 2002. “*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*”. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

, 2004, “*Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*”, UPP AMP YKPN: Yogyakarta

, 2007, “*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*”, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

Ida Ayu Purba Riani, David Kaluge, 2011, “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Di Provinsi Papua, Tahun Anggaran 2004-2008*”, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 9 No. 3.

Kroon, Kornelis, 2015, “*Analisis Perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah dan Keadaan Ekonomi Kabupaten Pemekaran dan Kabupaten Induk di Provinsi NTT*”. Tesis FE UNWIRA Kupang.

Mahmudi, 2010, “*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”, edisi kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Mananajemen, (YKPN): Yogyakarta.

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andhy: Yogyakarta.

Mudrajad Kuncoro, 2000. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

, 2004. *Otonomi dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Mulyanto, 2001. “*Identifikasi dan Analisis Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Eks-Karesidenan Surakarta*”. Usul Penelitian Dosen Muda FE UNS Surakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2004, No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2004, No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2004, No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.